



Polda Metro Jaya Usut Proyek UPS

Kabid Humas: Karena Permintaan Pemprov DKI

KASUS korupsi dugaan pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta sebesar Rp 330 miliar dari APBD Perubahan DKI Jakarta 2014 mulai diusut jajaran Polda Metro Jaya. Dimulainya pengusutan ini karena adanya permintaan berbagai pihak agar polisi pro aktif menyelidikinya, tanpa perlu menunggu adanya laporan masyarakat.

"Yang jelas (kasus) itu masih diselidiki. Karena ada permintaan dari beberapa pihak agar kami mengusut dugaan penyelewengan anggaran APBD dalam pengadaan UPS ini. Kami selaku penegak hukum sangat siap untuk melakukan penyelidikan," cetus Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Martinus Sitompul di Markas Polda (Mapolda) Metro Jaya, Selasa (3/3).

Namun, sayangnya Martinus enggan menyebutkan pihak mana saja yang meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut. Dia hanya mengatakan salah satunya permintaan dari Pemprov DKI Jakarta ■

Menurutnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim) Polda Metro Jaya yang akan menangani kasusnya dugaan penggangsiran uang negara itu.

"Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro sudah memulai langkah awal untuk mengusut kasus tersebut. Mereka melakukan penyelidikan mulai dari dokumen hingga orang-orang yang diduga terkait dalam permasalahan itu, hingga lokasi-lokasinya," terang mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini.

Sayangnya, lagi-lagi, Martinus belum bisa memberitahukan siapa saja orang-orang yang

akan diperiksa penyidik terkait kasus dugaan korupsi proyek bernilai ratusan miliaran tersebut. "Yang jelas pengusutan ini bukan hanya berdasar permintaan Pemprov DKI, tetapi juga dari informasi masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui, dugaan ketidakberesan kasus pengadaan UPS dalam APBD Perubahan 2014 mencuat lantaran Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berseteru dengan DPRD DKI.

Bermula ketika APBD DKI 2015 versi DPRD DKI diduga memasukkan anggaran proyek sebesar Rp 12,1 triliun. Namun dalam APBD DKI 2015 yang dikirim ke Kemendagri untuk pengesahan versi Pemprov DKI, anggaran itu dicoret.

Akibatnya, dewan langsung mempermasalahkan pengiriman draft APBD DKI 2015 tersebut. Hingga akhirnya DPRD DKI mengajukan hak angket atau hak penyelidikan terkait pengiriman APBD DKI 2015 yang diklaim dewan *illegal* karena tanpa persetujuan mereka. Ahok membalas aksi para anggota dewan itu dengan melaporkan proyek UPS senilai Rp 380 miliar.

Kasus itu sudah dilaporkan Ahok kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (27/2) lalu.

Apalagi, Ahok mengaku dalam anggaran APBD DKI 2015 juga terdapat pembelian UPS untuk 56 kelurahan dan 7 kecamatan sebesar Rp 280 miliar. Setiap UPS dihargai Rp 4,8 miliar. Ahok curiga proyek UPS itu timbul karena pesanan dari anggota DPRD DKI.

Apalagi berdasarkan penyelidikan internal Pemprov DKI, perusahaan-perusahaan pemenang tender pengadaan alat ini merupakan pihak yang sama, selain itu perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah itu pun kebanyakan tidak jelas alias perusahaan fik-

tif.

Menurut Ahok juga, pengadaan perangkat UPS atau pasokan daya bebas gangguan pada APBD 2014 dengan harga sekitar Rp 5,8 miliar per unit itu. Proyek UPS itu dibagikan kepada 48 SMA dan SMK negeri di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. UPS adalah alat pasokan listrik bebas gangguan yang sudah dibagikan kepada 24 SMA dan 24 SMK di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. (ind)



Sekolah SMA/SMK Penerima Proyek UPS

Sekolah di Jakarta Barat	Nilai Anggaran
1. SMK Negeri 45	Rp 5.822.608.000
2. SMK Negeri 42	Rp 5.833.448.500
3. SMK Negeri 35	Rp 5.832.750.000
4. SMK Negeri 17	Rp 5.831.408.000
5. SMK Negeri 13	Rp 5.831.408.000
6. SMK Negeri 11	Rp 5.794.822.000
7. SMK Negeri 9	Rp 5.830.044.000
8. SMA Negeri 112	Rp 5.831.760.000
9. SMA Negeri 101	Rp 5.831.760.000
10. SMA Negeri 96	Rp 5.833.410.000
11. SMA Negeri 94	Rp 5.832.035.000
12. SMA Negeri 85	Rp 5.830.880.000
13. SMA Negeri 84	Rp 5.833.520.000
14. SMA Negeri 78	Rp 5.826.810.000
15. SMA Negeri 65	Rp 5.833.311.000
16. SMA Negeri 57	Rp 5.830.858.000
17. SMA Negeri 56	Rp 5.829.967.000
18. SMA Negeri 33	Rp 5.832.618.000
19. SMA Negeri 23	Rp 5.834.290.000
20. SMA Negeri 19	Rp 5.832.200.000
21. SMA Negeri 17	Rp 5.832.805.000
22. SMA Negeri 16	Rp 5.831.034.000
23. SMA Negeri 2	Rp 5.837.337.550
24. SMK Negeri 60	Rp 5.833.300.000
25. SMK Negeri 53	Rp 5.833.289.000

ANGGAMDOPOS

Sekolah di Jakarta Pusat	Nilai anggaran
1. SMA Negeri 27	Rp 5.831.375.000
2. SMA Negeri 25	Rp 5.819.484.000
3. SMA Negeri 24	Rp 5.825.380.000
4. SMA Negeri 20	Rp 5.834.950.000
5. SMA Negeri 10	Rp 5.832.530.000
6. SMA Negeri 7	Rp 5.837.832.000
7. SMA Negeri 5	Rp 5.829.967.000
8. SMA Negeri 4	Rp 5.832.805.000
9. SMA Negeri 1	Rp 5.832.200.000
10. SMK Negeri 44	Rp 5.830.044.000
11. SMK Negeri 16	Rp 5.837.337.550
12. SMK Negeri 14	Rp 5.839.174.000

Sekolah di Jakarta Pusat	Nilai anggaran
13. SMK Negeri 3	Rp 5.830.000.000
14. SMK Negeri 39	Rp 5.831.408.000
15. SMK Negeri 1	Rp 5.831.760.000
16. SMK Negeri 34	Rp 5.833.960.000
17. SMK Negeri 31	Rp 5.835.170.000
18. SMK Negeri 27	Rp 5.832.618.000
19. SMK Negeri 21	Rp 5.832.530.000
20. SMK Negeri 19	Rp 5.834.510.000
21. SMA Negeri 77	Rp 5.832.827.000
22. SMA Negeri 68	Rp 5.833.058.000
23. SMA Negeri 35	Rp 5.833.311.000
24. SMA Negeri 30	Rp 5.831.870.000

ANGGAMDOPOS